

BAB I POLMAS SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN POLRI?

Sejak 1 April 1999, Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi pisah dari ABRI. Pemisahan ini selanjutnya diperkuat oleh keluarnya TAP MPR RI No. VI tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII tentang pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan. Dampak pemisahan organisasi dan peran tersebut, menyebabkan perbedaan penafsiran dalam mengartikulasikan masalah keamanan. Tak heran, benturan kepentingan antara TNI dan Polri seringkali tidak dapat dihindari. Ada kesan bahwa apa yang dulu dikuasai oleh TNI (militer) khususnya masalah keamanan dalam negeri, sekarang berpindah tangan ke pihak Polri. Inilah salah satu warisan Orde Baru di masa transisi yang menyebabkan penataan bidang pertahanan dan keamanan seakan-akan mengalami stagnasi, karena sejak awal polisi berada di bawah TNI. Akibatnya, ketika struktur organisasi mereka di pisah, muncul wilayah abu-abu, antara pertahanan dan keamanan yang sering memicu pertikaian. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kenyataan bahwa keberadaan Polri di masyarakat menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri.¹

Padahal, salah satu tujuan ideal pemisahan Polri dalam struktur militer adalah untuk menciptakan suatu institusi polisi yang berkarakter sipil. Selain itu, pemisahan juga dimaksudkan agar karakter militeristik yang selama ini telah mendarah daging diinternal Polri, secara berangsur-angsur dapat dihilangkan, sehingga Polri akan benar-benar menjadi polisi sipil. Sayangnya, langkah-langkah reformasi internal Polri belum sepenuhnya mengarah pada penciptaan polisi sipil yang profesional. Selama kurang lebih sebelas tahun sejak 1 April 1999, penataan Polri secara profesional masih terhambat oleh berbagai kendala, seperti: *pertama*, reformasi Polri belum menjadi fokus utama bagi para politisi sipil dan beberapa lembaga donor untuk mendorong terciptanya polisi sipil yang profesional, hal ini nampak pada kenyataan bahwa lembaga donor maupun politisi sipil lebih memilih

¹ Di samping masalah rebutan 'jatah preman' antara TNI dan Polri, di internal Polri tersendiri merasa bahwa pemisahan tersebut merupakan suatu peluang bagi oknum-oknumnya untuk meraup keuntungan pribadi, baik lewat jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Lebih lanjut lihat 'Diduga Terlibat Pencurian Mobil Mewah, Wakapolwil Cirebon Diusut' Pikiran Rakyat, 5 Oktober 2007.